

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki sebuah kewajiban sebagai penyelenggara pembangunan yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban atau tugas pokok pemerintah yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Pemerintah yang diharapkan sebagai penataan pelayanan publik yang diselenggarakan diberbagai sektor. Sektor pemerintah salah satunya memiliki peranan penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya tata kelola yang baik atau *good governance*. *Good governance* adalah seperangkat ketentuan yang mengatur interaksi antara berbagai pihak berkepentingan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, *good governance* merupakan penerapan nilai-nilai yang berfungsi untuk membimbing, mengendalikan, dan memengaruhi penyelesaian masalah publik sehingga nilai-nilai tersebut terwujud dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. (Tahir, 2022). *Good governance* menjadi kewajiban yang harus diterapkan oleh setiap pemerintah demi mewujudkan aspirasi masyarakat agar tercapainya tujuan. Untuk mewujudkan *good governance* salah satu indikator utamanya adalah terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam di antara seluruh aparatur negara mengenai pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Andhini et al., 2023) Para pegawai pemerintah harus menyadari bahwa transformasi dalam pendekatan mereka terhadap jasa publik sangat

diperlukan, mengingat pelayanan publik yang berkualitas dan responsive merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan, efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Good governance dalam pengelolaan keuangan di instansi pemerintah mencakup beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip dasar tata kelola yang baik, yang mengharuskan setiap organisasi sektor publik untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada pemangku kepentingan secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Radeana et al., 2024). Hal ini memungkinkan public untuk memahami bagaimana uang publik digunakan. Instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka, termasuk pertanggungjawaban kepada public dan lembaga pengawas, sistem audit yang efektif dan independen sangat penting untuk memastikan akuntabilitas. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan pengeluaran ini sangat dapat dilakukan melalui konsultasi public dan forum diskusi, sehingga masyarakat merasa memiliki hak dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan. *Good governance* menuntut pengelolaan keuangan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan program. Evaluasi kinerja secara berkala membantu memastikan bahwa tujuannya tercapai.

Masih terdapat tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, yang dapat menimbulkan potensi korupsi. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan, yang

disampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Lestary & Muniroh, 2023). Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan dapat mengakibatkan proyek tidak berjalan sesuai rencana. Keterlambatan dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah sering juga dapat menghambat pelaksanaan proyek. Tantangan dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan proyek infrastruktur, Keterbatas kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Maka dari itu pentingnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan di mana mampu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada insitusi pemerintah. Sistem pelaporan yang efektif menentukan kinerja manajerial dalam pengelolaan keuangan, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Suastini & Karyada, 2023)

Peralihan dari sistem manual ke sistem otomatis pada pengelolaan keuangan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi prinsip-prinsip dari *good governance*. Peralihan sistem manual ke sistem otomatis dalam pengelolaan keuangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap *good governance*. Penggunaan teknologi informasi dan istem otomatis memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Peralihan sistem manual ke sistem otomatis.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yakni terbiasanya para pegawai menggunakan sistem manual sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai

tantangan dalam penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Kurang terampilnya dalam penggunaan sistem otomatis akan membuat kesulitan dalam memasukan data keuangan secara tepat waktu dan akurat yang di mana ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Laporan yang terlambat atau tidak akurat bisa mengurangi kepercayaan publik dan mempersulit pengawasan atas penggunaan anggaran. “Permasalahan yang dapat menghambatnya pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), salah satunya yakni peralihan yang awal mulanya menggunakan sistem manual kini beralih ke sistem otomatis, yang di mana para pegawai belum sepenuhnya terlatih dalam penggunaan sistem baru” begitu pernyataan dari Bapak Kadek Maha Kusuma Giri. S.M selaku Bendahara Pengeluaran, Bidang Keuangan di Dinas PUTR. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan kesulitan dalam melacak transaksi, yang di mana ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas pengelolaan keuangan pada Dinas PUTR. Bapak Putu Ari Sutada, Bidang Bina Marga menyatakan “Bahwa banyaknya kesalahan dalam pemberian nama pada paket anggaran yang harus diperbaiki sebelum proyek dilaksanakan yang di mana ini menyebabkan keterlambatan dalam peinputan data sehingga pegawai sering bekerja lembur hingga tengah malam untuk memperbaiki kesalahan input”.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan diri melalui upaya pemberdayaan dan reformasi total dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan nasional.

Pemerintah harus memastikan terciptanya tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. (Makalikis et al., 2022) Dalam upaya peralihan dari pengelolaan keuangan manual ke sistem otomatis, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi berbagai tantangan yang menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung sistem baru. Transisi ini memerlukan pelatihan yang intensif untuk memastikan seluruh pegawai dapat menggunakan sistem dengan efektif dan memahami prosedur baru yang diterapkan. Tanpa pelatihan yang memadai, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat terjadi, yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan hilangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan *good governance* juga penting untuk mengatasi potensi resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi.

Ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan pada sumber daya manusia merupakan masalah yang serius dan dapat menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak transparan. Hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan dana yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan sebelumnya (Desy Indriani, Petrus Peleng Roreng, 2023). Kurangnya pemahaman dan keahlian yang memadai dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan dan pengawasan, sehingga mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien dan efektif, mendukung pencapaian tujuan strategis serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terutama dalam pengaturan keuangan negara. Prinsip-prinsip ini juga krusial untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, penerapan prinsip *good governance* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi. (Tio, 2021) Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sering kali masih kurang memadai, peningkatan penggunaan sistem digital dan aplikasi untuk transparansi dan pelaporan keuangan semakin umum, berbanding dengan metode manual yang digunakan di masa lalu. Masyarakat kini lebih kritis dan aktif dalam meminta akuntabilitas, sedangkan di masa lalu partisipasi public cenderung rendah. Kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan keuangan semakin diperkuat, berbanding dengan periode sebelumnya yang lebih longgar. Adanya penekanan lebih pada prinsip keberlanjutan dalam proyek-proyek keuangan, sesuatu yang kurang diperhatikan di masa sebelumnya. Di mana perubahan ini menunjukkan kemajuan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai *good governance* yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Dengan menganalisis aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Hal ini penting karena pengelola keuangan yang baik merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan saat ini. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi, seperti birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif, rekomendasi ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi yang diperlukan, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih optimal. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam mendukung *good governance*. Dalam era digital saat ini, penggunaan sistem informasi dan aplikasi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi dapat memperbaiki praktik pengelolaan keuangan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan. Akhirnya penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran public tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah dan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan public. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara inovatif

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, sehingga *good governance* dapat terwujud secara lebih efektif.

Good governance dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam proyek-proyek infrastruktur. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik. Adanya laporan keuangan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Pengintegrasian teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dapat memperkuat prinsip *good governance*. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memanfaatkan sistem digital untuk pelaporan anggaran, monitoring proyek, dan akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, semua pihak dapat memantau perkembangan proyek secara *real-time* yang akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan public terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Implementasi teknologi diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih responsive dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan terkait *good governance* dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan penelitian ini akan mengenali permasalahan sebagai berikut :

1. Pegawai yang terbiasa menggunakan sistem manual cenderung kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem otomatis sehingga menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Ketidakmampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem otomatis dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini tidak mencakup aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di sektor publik secara umum, melainkan hanya akan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam Praktik *good governance* di Dinas PUTR.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan terkait *good governance* dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan penelitian ini akan dirumuskan yaitu, Bagaimana tata kelola yang baik

dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat terkait *good governance* dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Good governance dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan manfaat teoritis yang signifikan, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang esensial untuk memastikan pengguna anggaran yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi publik, Dinas dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek, sehingga meningkatkan kepercayaan publik, dan legitimasi kebijakan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan audit membantu mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi, yang pada gilirannya mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan, penerapan *good governance* berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Mahasiswa yang meneliti *good governance* dalam pengelolaan keuangan, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami konsep-konsep penting dalam manajemen publik dan keuangan. Melalui analisis yang

mendalam, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis yang berguna dalam karier dibidang pemerintahan. Penelitian ini juga memungkinkan mahasiswa untuk memahami tantangan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif berdasarkan temuannya.

- b. Bagi Universitas mendapatkan manfaat praktis dari penelitian dalam bentuk reputasi akademik yang meningkat. Dengan memfokuskan penelitian pada *good governance* universitas menunjukkan komitmen terhadap pengembangan pengetahuan yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum, kolaborasi dengan pemerintah, serta program pengabdian masyarakat.
- c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memanfaatkan hasil penelitian terkait *good governance* dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan praktik internal. Dengan mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, Dinas dapat memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan anggaran. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan terkini, membantu dinas dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsive dan berkelanjutan.